

**ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA OPERASI,  
DAN BELANJA MODAL TERHADAP EFISIENSI KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**NIKE MITA WELLYSA**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE EFFECT OF BALANCED FUNDS, OPERATIONS, AND CAPITAL EXPENDITURES ON FINANCIAL PERFORMANCE EFFICIENCY OF REGENCY/CITY GOVERNMENTS IN INDONESIA**

**By**

**NIKE MITA WELLYSA**

This This research was conducted with the aim of testing the effect of balancing funds, operating expenditures, and capital expenditures on the efficiency of local government financial performance. The population in this study are districts/cities in Indonesia. The number of research samples is 165 samples obtained using multistage sampling methods. The data source is obtained from the financial reports of district/city governments in Indonesia in 2019. The data analysis method used is multiple linear regression analysis with the SPSS 26 software application. Based on the results of multiple linear regression tests, the first hypothesis states that balancing funds have a negative effect on the efficiency of financial performance. The second hypothesis of operating expenditure does not affect the efficiency of local government financial performance, the third hypothesis of capital expenditure has a negative effect on the efficiency of local government financial performance.

**Keywords: Balancing Fund, Operational Expenditure, Capital Expenditure, and Regional Government Financial Performance Efficiency.**

## **ABSTRASK**

### **ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA OPERASI, DAN BELANJA MODAL TERHADAP EFISIENSI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

**Oleh**

**NIKE MITA WELLYSA**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji pengaruh dana perimbangan, belanja operasi, dan belanja modal terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah sampel penelitian adalah 165 sampel yang diperoleh menggunakan metode *multistage sampling*. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2019. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan aplikasi software SPSS 26. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda hipotesis pertama menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah, hipotesis kedua belanja operasi tidak berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah, hipotesis ketiga belanja modal berpengaruh negatif terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Kata Kunci: Dana Perimbangan, Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.**

**ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA OPERASI,  
DAN BELANJA MODAL TERHADAP EFISIENSI KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

Oleh

**NIKE MITA WELLYSA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA EKONOMI**

Pada

Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi

**: ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN,  
BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL  
TERHADAP EFISIENSI KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa

**: Nike Mita Wellysa**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1741031018**

Jurusan

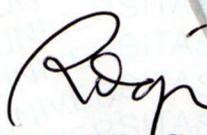
**: Akuntansi**

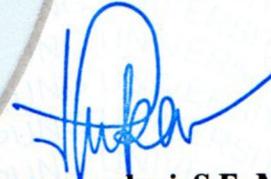
Fakultas

**: Ekonomi dan Bisnis**



**1. Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt**  
NIP. 197506202000122001

  
**Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.**  
NIP. 198701102014042001

**2. Ketua Jurusan Akuntansi**

  
**Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Ak., CA.**  
NIP. 19700871997032002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt** .....

Sekretaris : **Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA** .....

Penguji Utama : **Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA** .....



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 November 2021**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nike Mita Wellysa

NPM : 1741031018

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Operasi, Dan Belanja Modal Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia**” telah ditulis secara sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 November 2021



Nike Mita Wellysa

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Way Mengaku, Balik Bukit, Liwa, Lampung Barat pada tanggal 28 Oktober 1998 dengan nama lengkap Nike Mita Wellysa dan merupakan anak kedua dari lima bersaudara pasangan bapak Jasir Ependi dan Ibu Yusnani.

Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Pembina Way Mengaku Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2005, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Way Mengaku pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Liwa yang diselesaikan pada tahun 2014, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA N 1 Liwa pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila. Selama menjadi mahasiswi penulis aktif bergabung sebagai Brigadir Muda BEM FEB Unila periode 2017/2018 serta menjabat sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) periode 2019/2020. Pada Tahun 2020, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di desa Bakhu, Lampung Barat.

## PERSEMBAHAN

### *Alhamdulillahirabbil'alamin*

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karya ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Jasir Ependi dan Yusnani terimakasih atas segala doa, dukungan, semangat, kebahagiaan dan candatawa serta cucurankeringat perjuangan yang selalu kalian berikan untukku sehingga aku bisa melewati dan menyelesaikan semua tahapan pendidikan seperti yang kalian harapkan. Semoga Allah SWT selalu melindungi ayah dan bunda aamiin.
- ❖ Saudaraku Efri Sestiani, Ulfha Maharani, Ulfhi Maharani, dan M.Sutioso Riski Ramadinata yang senantiasa menyemangati dan memberikan dukungan serta doa untukku.
- ❖ Keponakan baikku Kiara Al-qibtiyya Indraputri terimakasih sudah hadir dan selalu menghibur serta memberikan senyuman disetiap kegelisahan dan kegalauanku.
- ❖ Seluruh keluarga besar, sahabat dan teman-teman yang telah menyemangati, mendoakan, dan menemani di setiap langkahku.
- ❖ Serta Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

## **MOTTO**

**“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.”**

**(Qs. Al-Baqarah: 45)**

**“Maka bersabarlah kamu dengan kesabar yang baik.”**

**(Qs. Al-Ma’arij: 5)**

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”**

**(Qs. Al-Insyirah: 5)**

**“Allah telah mentakdirkannya, dan apa yang dia kehendaki, dia lakukan”**

**(HR. Muslim 4/2052)**

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Operasi, dan Belanja Modal Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., C.A. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt. selaku pembimbing utama yang telah membimbing, memberikan motivasi, dan sangat peduli kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu,

perhatian, bimbingan, serta nasihat yang telah diberikan dengan penuh kesabaran.

5. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku pembimbing kedua yang telah begitu peduli dan bersedia memberikan waktu, bimbingan, saran dan kritik yang bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran dan perhatian.
6. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku penguji utama pada ujian skripsi. Terimakasih untuk masukan dan saran yang membangun selama proses penyusunan serta penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Komaruddin, S.E., M.E., CA., CPA. selaku pembimbing akademik atas bimbingannya selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan proses belajar.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran selama penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
9. Bapak dan ibu Staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu dalam kelancaran perkuliahan.
10. Untuk sahabatku Zulmia Oktaviani, Kurniati Angelia, Monica Valencia Putri, Nadia Putri Maghfira, Karina Helida, Vera Lidia, Kiki Nuraini, yang selalu memberikan dukungan, semangat, nasihat, motivasi, dan selalu ada kapanpun dalam keadaan susah maupun senang.

11. Untuk teman KKN Desa Bakhu (Serly, Yanuar, Beni, Bang Ray, Rizky, Yeni, Aulia, Intan, Ridho, Ari, Gita, Puspita, Kak Yuka) terimakasih atas pembelajaran, kebersamaan, canda tawa, suka dan duka selama pengabdian terhadap masyarakat di desa Bakhu.
12. Untuk HIMAKTA 2019/2020 yang telah memberikan tempat untukku belajar susah senang dalam berorganisasi.
13. Untuk Akuntansi 2017 terimakasih atas kebersamaan, motivasi, dan dukungan selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
14. Untuk Nike Mita Wellysa terimakasih sudah selalu berjuang, kuat, sabar, ikhlas, dan bertahan hingga sampai di titik ini dan terselesainya skripsi ini.

Semoga dengan kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat. Aamiin ya Rabbal'Alamin.

Bandar Lampung, 15 November 2021

Nike Mita Wellysa

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
1. Manfaat PenelitianManfaat Bagi Peneliti .....	6
2. Manfaat Bagi Akademis .....	7
3. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah .....	7
<b>II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS</b>	

A. Kajian Pustaka.....	8
1. Teori Agensi.....	8
2. Teori Stewardship.....	9
3. Pemerintah Daerah.....	10
4. Dana Perimbangan.....	11
5. Belanja Operasi.....	12
6. Belanja Modal.....	13
7. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	14
B. Peneliti Terdahulu.....	16
C. Kerangka Pemikiran.....	20
D. Pengembangan Hipotesis.....	21

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sumber Data.....	26
B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	26
C. Metode Pengumpulan Data.....	27
D. Definisi dan Operasionalisasi Variabel.....	27
1. Variabel Independen.....	27
a.) Dana Perimbangan.....	27
b.) Belanja Operasi.....	28
c.) Belanja Modal.....	29
2. Variabel Dependen.....	30
E. Metode Analisis Data.....	31
1. Uji Statistik Deskriptif.....	31
2. Uji Asumsi Klasik.....	32
a.) Uji Normalitas.....	32
b.) Uji Multikolonieritas.....	32
c.) Uji Autokorelasi.....	33
d.) Uji Heteroskedatisitas.....	33

3. Uji Statistik F .....	33
4. Uji Statistik t .....	34

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Objek Penelitian .....	35
B. Statistik Deskriptif .....	37
C. Uji Asumsi Klasik .....	38
1. Uji Normalitas .....	38
2. Uji Multikolinieritas .....	39
3. Uji Autokorelasi .....	40
4. Uji Heterokedastisitas .....	40
D. Uji Statistik F .....	41
E. Uji Statistik t .....	42
F. Analisis Regresi Linier Berganda .....	43
G. Pembahasan .....	45
1. Dana Perimbangan terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	45
2. Belanja Operasi terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	46
3. Belanja Modal terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	48

#### **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	51
B. Keterbatasan Penelitian .....	51
C. Saran .....	52

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu .....	16
4.1 Hasil Pengamatan Sampel .....	36
4.2 Statistik Deskriptif .....	37
4.3 Hasil Uji Normaitas .....	38
4.4 Hasil Uji Multikolinieritas .....	39
4.5 Hasil Uji Autokorelasi .....	40
4.6 Hasil Uji Statistik F .....	42
4.7 Hasil Uji Statistik t .....	42
4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	43

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	21
4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterpplot.....	41

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia memiliki entitas pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Entitas pemerintahan ini bertujuan untuk melayani serta mensejahterakan masyarakat dan tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Meskipun begitu, entitas pemerintahan memerlukan lembaga ekonomi untuk mengatur perekonomian pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah dalam upaya pelayanan terhadap masyarakat. Maka dari itu di setiap entitas pemerintahan tentu memiliki laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang telah disusun oleh lembaga ekonomi pemerintah sebagai laporan keuangan mengenai penerimaan serta pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam periode yang bersangkutan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan masyarakat. Sehingga dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berisikan sumber pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Salah satu sumber pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah yaitu Pendapatan Transfer Dana Perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana bantuan yang ditransfer oleh pemerintah

pusat kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Tujuan pemberian bantuan Dana Perimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah, serta kebutuhan khusus yang mendesak. Sedangkan biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bab 1 pasal 1 no 13 menjelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Artinya bahwa seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah akan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai Belanja Daerah dikarenakan belanja daerah merupakan salah satu komponen penting bagi publik. Belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat serta sebagai bentuk investasi. Belanja daerah ini juga digolongkan kedalam jenis pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah seperti belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi merupakan belanja daerah yang biasanya dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam keseharian. Untuk menganalisis besarnya belanja operasi dapat digunakan rumus rasio belanja operasi sedangkan belanja modal biasanya digunakan sebagai bentuk investasi. Untuk menganalisis besarnya belanja modal dapat digunakan rumus rasio belanja modal. Dalam pengalokasian belanja daerah terdapat ketentuan dimana anggaran belanja merupakan batas

maksimum pengeluaran yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Jika Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran melebihi anggaran maka kinerja belanja pemerintah daerah tersebut dinilai tidak baik. Meskipun demikian selisih antara anggaran dan belanja daerah yang signifikan dapat memberikan kemungkinan bahwa terjadi inefisiensi anggaran atau kelemahan anggaran sehingga estimasi anggaran yang diterapkan tidak terrealisasikan dengan baik. Oleh karena itu Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kebutuhan daerah yang telah dianggarkan. Dimana pemerintah daerah disarankan untuk menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan maupun pengeluaran-pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Sehingga mampu mencapai efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan merupakan salah satu tolak ukur dalam menentukan tingkat keberhasilan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah terdapat dalam laporan keuangan neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah yang utama dikarenakan anggaran dalam pemerintahan merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan (Sinambela & Pohan, 2016). Maka dari itu, untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu indikator dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah ialah efisiensi.

Efisiensi merupakan hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan dalam suatu kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan (Nordawan dan Hertianti, 2010). Hal ini harus dicapai dengan mengurangi jumlah input yang dikonsumsi untuk menghasilkan tingkat output (Ferreira & Marques, 2014). Pengertian efisiensi saling berhubungan dengan konsep produktivitas. Dimana pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (Halim & Kusufi, 2017). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kami mencatat adanya kelemahan pengelolaan anggaran dari sisi inefisiensi dimana belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berada dalam persentase tinggi yaitu 36%, biaya belanja yang sifatnya bukan belanja investasi seperti, belanja barang dan jasa, perjalanan dinas sekitar 13,4% serta belanja jasa kantor mencapai 17,5%. Sehingga kurang lebih 70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya digunakan untuk keseharian saja ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) akses: 15 Oktober 2020).

Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah masih memberikan hasil yang berbeda beda. Berkaitan dengan dana perimbangan, penelitian yang dilakukan oleh Yasin *et al.*, (2017) menemukan bahwa dana perimbangan signifikan dengan arah positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Yunita & Rasmini, (2018) menemukan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Astiti & Mimba, (2016) tentang pengaruh belanja operasi terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah menemukan bahwa belanja rutin tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Saputri, (2020) menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Wahyuni & Ardini, (2018) menemukan bahwa belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Andirfa *et al.*, (2016) tentang belanja modal menemukan bahwa secara parsial belanja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten dan kota di provinsi Aceh. Aminah *et al.*, (2019) menemukan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Yuliansyah *et al.*, (2020) menemukan bahwa belanja modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Astiti & Mimba, (2016) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Operasi, dan Belanja Modal Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah ?

2. Apakah belanja operasi berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah ?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah.
2. Mengetahui pengaruh belanja operasi terhadap efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah.
3. Mengetahui pengaruh belanja modal terhadap efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini merupakan salah satu sarana bagi peneliti dalam mendapatkan pengetahuan serta wawasan dalam mengimplementasikan ilmu-ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta sebagai salah satu syarat yang harus di penuhi dalam meraih gelar sarjana.

## **2. Bagi Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang akan menyelesaikan penelitiannya dengan bahasan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.

## **3. Bagi Pemerintahan Daerah**

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran bagi pemerintah daerah dalam menganalisis dan menilai bagian-bagian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk melihat tingkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang sudah dijalankan.

## II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### A. Kajian Pustaka

#### 1. Teori Agensi

Menurut Jansen and Meckling dalam Zelmianti, (2016) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara principal dengan agen, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Sebagai agen manajer secara moral memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) sedangkan disisi lain dia juga memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Teori agensi merupakan salah satu teori yang dapat diterapkan pada sektor publik (Zelmianti, 2016). Teori ini berprinsip bahwa adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*), dalam bentuk kontrak kerjasama, dimana pengaplikasian dari teori ini dapat menimbulkan perilaku efisiensi ataukah perilaku oportunistik bagi pihak *agent* (Andrean & Sari, 2020). *Agent* (pemerintah) memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan keuntungan *principal* serta kebutuhan ekonominya sendiri sehingga sering terjadi konflik antar keduanya dimana

pemerintah yang dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Hubungan teori keagenan ini adalah pemerintah sebagai agen harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai prinsipal (Thalib & Ekaningtias, 2019). Oleh karena itu dibutuhkannya pengawasan untuk memastikan bahwa pemerintah telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan dalam memenuhi tanggung jawabnya. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hasil berupa opini, temuan audit, serta kesimpulan yang berupa rekomendasi.

## **2. Teori Stewardship**

Teori stewardship disebut juga sebagai teori pengelolaan. Teori stewardship merupakan teori yang menjelaskan mengenai situasi dimana manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi, melainkan lebih mementingkan kepentingan *principal* sehingga manajer akan bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan keputusan bersama. Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Teori ini dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik seperti pemerintahan dan organisasi nonprofit lainnya. Dimana organisasi sektor publik diharuskan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Dalam penerapannya, teori *stewardship* dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai

suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik, maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal (Sudaryo et al., 2017).

### **3. Pemerintahan Daerah**

Pemerintah merupakan sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik secara bersama-sama dalam menopang tanggung jawab yang terbatas dalam penggunaan kekuasaan (Halim dan Kusufi, 2014). Secara umum, pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki kekuasaan dalam membuat serta menerapkan hukum dan undang-undang dalam wilayah tertentu. Pemerintah terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat adalah presiden RI yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan pusat meliputi lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia (Nordiawan dan Hertianti, 2010). Pemerintah daerah merupakan pemerintahan yang berada di bawah naungan pemerintah pusat. Pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI (Nordiawan dan Hertianti, 2010). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah, Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas pelaporan penerimaan pendapatan daerah serta pengeluaran daerahnya. Penerimaan dan pengeluaran tersebut akan di laporkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut (1) andal, (2) relevan, (3) dapat dipahami, (4) dapat dibandingkan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dipercayakan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola pemerintahan daerah (Maydiyanti *et al.*, 2020). Maka dari itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus di susun dengan sebaik mungkin sehingga gambaran mengenai daerah yang bersangkutan akan terlihat baik pula.

#### **4. Dana Perimbangan**

Salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah yaitu dengan memberikan bantuan keuangan dengan tujuan menciptakan keseimbangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta untuk mengatasi kesenjangan fiskal. Dalam mengatasi kesenjangan fiskal, Pemerintah Pusat memberikan bantuan

keuangan yang di transfer kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Kabupaten yang dianggap tertinggal secara ekonomi juga diberikan transfer pemerintah (Delewa, 2016). Transfer bantuan keuangan tersebut merupakan dana perimbangan. Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Secara umum Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber Dana Perimbangan tidak bisa dipisahkan dikarenakan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengalokasiannya masing-masing. Dana perimbangan ditujukan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, serta mengurangi ketidakselarasan sumber pendanaan pemerintah antar Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi ketidakselarasan pendanaan pemerintah antar-Daerah (Amin, 2019).

## **5. Belanja Operasi**

PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menjelaskan bahwa belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi

manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa Belanja Operasi merupakan pengeluaran pemerintah yang di anggarkan untuk keperluan sehari-hari dengan masa manfaat jangka pendek. Belanja operasi memiliki peran penting dalam mencapai kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta peningkatan efisiensi dan produktivitas (Yasin *et al.*, 2017). Belanja Operasi digambarkan dengan rasio Belanja Operasi. Dimana rasio belanja operasi akan membantu memberikan informasi mengenai besarnya belanja daerah yang dialokasikan kedalam belanja operasi.

## **6. Belanja Modal**

Belanja modal merupakan jenis pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (The Ministry of Finance of The Republic of Indonesia, 2017). PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dapat berupa belanja daerah seperti pembelian tanah, gedung ataupun gudang, peralatan serta aset tak berwujud. Di Indonesia, belanja modal disajikan dalam LRA yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan konstruksi,

belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, serta belanja modal aset lainnya (Dalimunthe & Patrisia, 2019). Keputusan pemerintah dalam mengalokasikan dana sebagai belanja modal yaitu membiayai kegiatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat menandakan bahwa pemerintah telah mengelola keuangan daerah dengan baik (Astuti & Mimba, 2016). Semakin tinggi belanja modal suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi terhadap kinerja keuangan di suatu daerah (Jannah, 2019). Belanja modal digambarkan dengan rasio belanja modal. Dimana rasio belanja modal membantu memberikan informasi mengenai seberapa besar belanja daerah yang dialokasikan kedalam belanja modal.

## **7. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja merupakan keluaran atau hasil dari program maupun kegiatan yang akan atau telah tercapai sehubungan dengan penggunaan anggaran berdasarkan kualitas dan kuantitas yang terukur. Kinerja keuangan merupakan salah satu sarana untuk mengetahui pencapaian yang telah didapat dalam suatu periode tertentu. Kinerja keuangan juga merupakan tolak ukur mengenai kinerja berdasarkan indikator keuangan. Pada dasarnya, kinerja keuangan dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang berkelanjutan (Sudaryo *et al.*, 2017). Kinerja

keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Menurut Delewa, (2016) kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan semua manfaat, finansial serta kegiatan-kegiatan yang dinikmati masyarakat sebagai hasil implementasi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola tugasnya dengan baik. Pemerintahan tentu memiliki laporan keuangan neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggung jawaban. Laporan Keuangan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Tiga tujuan yang dapat dicapai berdasarkan pengukuran kinerja keuangan pemerintah antara lain, meningkatkan kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pengambilan keputusan, serta mewujudkan akuntabilitas publik dan meningkatkan komunikasi kelembagaan (Yuliansyah *et al.*, 2020).

Pada dasarnya, penilaian kinerja sektor publik dapat dilihat menggunakan *Value For Money*. Penilaian tersebut meliputi tiga komponen utama yaitu pengukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dari ketiga komponen tersebut, efisiensi merupakan komponen yang digunakan sebagai pengukuran kinerja (Andirfa *et al.*, 2016). Efisiensi merupakan gambaran antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan alokasi yang dianggarkan pemerintah,

dimana suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila telah mencapai *output* yang maksimal dengan input yang serendah-rendahnya atau dengan biaya minimum dapat mencapai hasil yang diinginkan (Armaja, Ibrahim, R., 2015). Kinerja keuangan pemerintah daerah ini merupakan hal penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal sebagai peningkatan program selanjutnya dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas (Sari *et al.*, 2016). Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan maka kinerja keuangan daerahnya buruk (Sudaryo *et al.*, 2017).

## B. Peneliti Terdahulu

Peneliti terdahulu merupakan referensi dalam melakukan penelitian ini, sehingga dalam penelitian ini terdapat berbagai teori yang dapat digunakan. Berikut ini merupakan daftar penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Akihiro Otsuka, Mika Goto, and Toshiyuki Sueyoshi (2014)	<i>Cost-efficiency of Japanese local governments: effects of decentralization and regional integration</i>	<i>Stochastic Frontier Analysis (SFA)</i>	- <i>The fiscal transfer ratio negatively affected the cost-efficiency of local governments.</i> - <i>The size of local government, positively influenced the degree of cost-efficiency.</i>
2.	Nuno Ferreira da Cruz, Rui	<i>Revisting the determinants of</i>	<i>DEA</i>	- <i>Any performance evaluation model to be</i>

	Cunha Marques (2014)	<i>local government performance</i>		<i>applied to the local governments of a given country (either for simple benchmarking or policy making purposes) must take into account several exogenous variables (not controlled by local executives) in order to be robust. This does not necessarily mean, nonetheless, that such an evaluation model would be desirable. -For the portuguese case, the results strongly suggest that increased economic performance is positively associated with the education level of the population, the presence of right-wing executives and objectives other than the simpel reelection, and negatively associated with touristic activity, voter turnout, aging index, concentration and purchasing power of the population, larger municipal areas and historical net debt.</i>
3.	Paul Onyango-Delwa (2016)	<i>Central Government Patronage, Donor AID, and Budget Performance in Local Government: Testing A Mediation Effect</i>	<i>A mixed methods design</i>	<i>-Both central government patronage and donor aid predict budget performance. -Autonomy does not mediate the interactions as initially hypothesized.</i>
4.	Maulia Andirfa, Dr. Hasan Basri, M.Com, CA, Dr. M.Shabri A. Majid, SE., M.Ec (2016)	Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh	Analisis Kuantitatif dengan model regresi berganda.	-Belanja Modal, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan -Secara parsial Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah dan

				Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. -Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten kota di Provinsi Aceh.
5.	Desak Nyoman Yulia Astiti, Ni Putu Sri Harta Mimba (2016)	Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Parsial Least Square (PLS)	-Belanja Rutin tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. -Belanja modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. -Belanja Rutin dan Belanja Daerah mampu mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
6.	Muhammad Yasin, Slamet Riyadi, Ibrahim Ingga (2017)	Analisis Pengaruh Struktur APBD terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur	Uji Statistik	-PAD tidak signifikan dengan arah hubungan negatif terhadap Kinerja Keuangan. -PAD tidak signifikan dengan arah hubungan yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. -Dana Perimbangan signifikan dengan arah positif terhadap Kinerja Keuangan. -Dana Perimbangan tidak signifikan dengan arah negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. -Belanja Rutin signifikan dengan arah positif terhadap kinerja keuangan. -Belanja Rutin tidak signifikan dengan arah negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. -Belanja Pembangunan tidak signifikan dengan arah negatif terhadap Kinerja Keuangan. -Belanja Pembangunan signifikan dengan arah positif terhadap

				<p>Pertumbuhan Ekonomi.</p> <p>-Kinerja keuangan signifikan dengan arah positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.</p>
7.	Zhigang Chen, Bingyang Lv, Yongzheng Liu (2019)	<i>Financial development and the composition of government expenditure: Theory and cross-country evidence</i>	<i>Endogenous Growth Model</i>	<i>We find supporting evidence that countries with higher financial development tend to have lower productive expenditure. This result is robust across alternative measures of the key variables and alternative estimations with and without correcting the potential endogeneity issue of financial development.</i>
8.	Fikri Rizki Utama, Einde Evana, Rindu Rika Gamayuni (2019)	<i>The Effect of Local Government Characteristics on Performance of Local Government Administration</i>	<i>Purposive Sampling Method.</i>	<i>The variables of legislative size had a positive and significant effect on the performance of local government administration while the level of regional wealth, dependency level to the central government and capital expenditure contribution had no significant effect on the performance of the local government.</i>
9.	Firmansyah Thalib, Diah Ekaningtias (2019)	<i>The Effect of original LG revenue, Balancing Fund, and Capital expenditure on LG financial performance in regencies in east Java Province</i>	<i>Saturated Sampling Method</i>	<p>-LG revenue and balancing funds have a negative and significant effect on LG financial performance</p> <p>-while capital expenditure has no effect on LG financial performance.</p>
10.	Isabel Narbon-Perpina, Ivan Arribas, Maria Teresa Balaguer-Coll, Emili Tortosa-Ausina (2020)	<i>Explaining local governments cost efficiency: Controllable and uncontrollable factors</i>	<p>-Non-parametric efficiency analysis framework</p> <p>-Accounting for the external environment when analysing local governments</p>	<p>-Results show an asymmetry in the determinants of performance since the role played by some variables depends largely on the conditional distribution of efficiency.</p> <p>-Results are robust not only because of the</p>

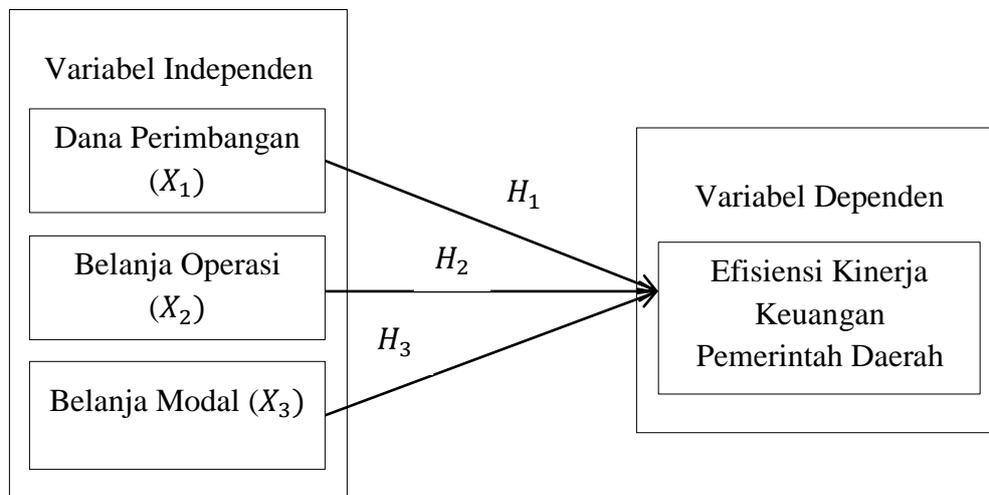
			<i>efficiency.</i>	<i>instrumental variables quantile regression approach considered, but also due to the variety of models specified to measure municipalities performance as well as the diversity of covariates.</i>
--	--	--	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Sumber: Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional Terdahulu**

### C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menganalisis mengenai Dana Perimbangan, Belanja Operasi, dan Belanja Modal terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Dalam analisis ini kita akan melihat bagaimana Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah dan Belanja Operasi serta Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah berpengaruh terhadap Efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam periode tertentu. Dimana besarnya dana perimbangan, belanja operasi, dan belanja modal yang dimiliki pemerintah merupakan bagian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan salah satu penentu efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk itu perlu dilakukannya analisis sehingga dapat dilihat tingkat efisiensi kinerja keuangannya. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut ini :

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



#### **D. Pengembangan Hipotesis**

##### **1. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah.**

Dana Perimbangan merupakan pendapatan transfer daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai tujuan pemerataan pembangunan daerah. Adanya Pendapatan Dana Transfer ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur di daerahnya. Selain itu Dana Perimbangan juga berfungsi dalam mengurangi ketidakselarasan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semakin besar Dana Transfer yang diterima oleh pemerintah daerah maka akan semakin besar dana yang dikelola pemerintah dalam membiayai kelebihan belanja. Sumber keuangan yang bersifat eksternal ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam bentuk

pertanggung jawaban pengeolaan keuangan. Semakin besar dana perimbangan maka kinerja keuangan yang diukur berdasarkan rasio efisiensi akan semakin tinggi. Rasio efisiensi yang tinggi mengidentifikasikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah yang buruk.

Penelitian yang dilakukan *Otsuka et al.*, (2014) menemukan bahwa transfer fiskal berpengaruh negatif terhadap efisiensi biaya, *Andirfa et al.*, (2016) menemukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Thalib dan Ekaningtias* (2019) dan *Yuliansyah et al.*, (2020) juga menemukan bahwa Dana Perimbangan secara negatif dan signifikan berpengaruh pada kinerja keuangan pemda, Berdasarkan uraian mengenai Dana Perimbangan, maka hipotesis yang di ajukan penulis yaitu :

**H1 : Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. (Semakin efisien).**

## **2. Pengaruh belanja operasi terhadap efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah.**

Belanja operasi merupakan bagian dari belanja daerah dimana pengalokasiannya di tujukan untuk belanja sehari-hari dalam jangka pendek atau dengan masa manfaat kurang dari satu tahun. Besarnya belanja operasi dapat dilihat dengan menggunakan rasio belanja operasi. Tujuannya untuk melihat tingkat belanja operasi yang

dialokasikan dalam belanja daerah. Sehingga nantinya diharapkan dengan hasil rasio ini akan memperlihatkan pengaruh belanja operasi terhadap efisiensi kinerja keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerahnya. Semakin besar belanja operasi yang dikeluarkan maka akan menunjukkan adanya pemborosan dimana belanja operasi hanya memiliki masa manfaat yang singkat dan tidak dapat digunakan secara berulang. Hal ini akan mengakibatkan tingginya rasio efisiensi dimana belanja lebih besar dari pada pendapatannya. Dengan menggunakan pengukuran rasio efisiensi semakin tinggi nilai rasio efisiensi maka kinerja keuangan pemerintah daerahnya kurang baik. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengurangi pengeluaran untuk keperluan sehari-hari dalam upaya mencapai efisiensi (*Chen et al., 2019*). Maka dari itu pemerintah daerah diberi tanggung jawab dan kepercayaan untuk mampu mengelola belanja operasi dengan sebaik dan semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya pemborosan sehingga kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi menandakan kinerja yang baik.

*Yasin et al., (2017)* menemukan bahwa belanja rutin berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kinerja keuangan. *Risyad et al., (2018)* menemukan bahwa belanja rutin berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan uraian mengenai belanja operasi, maka hipotesis yang diajukan penulis yaitu :

**H2 : Belanja Operasi berpengaruh positif terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. (Semakin tidak efisien).**

**3. Pengaruh belanja modal terhadap efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah.**

Belanja modal merupakan pengalokasian belanja daerah yang ditujukan untuk pembelian aset atau pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu panjang. Semakin tinggi belanja modal menunjukkan adanya peningkatan investasi yang dibuktikan dengan banyak pembangunan yang dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, sehingga kinerja pemerintah daerah akan lebih baik. Semakin tinggi belanja modal suatu daerah maka semakin meningkat pula tingkat efisiensi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dimana tingginya belanja modal (input) diimbangi dengan masa manfaat jangka panjang (output) yang dimiliki. Dengan menggunakan rasio belanja modal diharapkan mampu menggambarkan dan memberikan informasi mengenai tingkat pengalokasian belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Sukma & Panji, (2018) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Thalib dan Ekaningtias (2019) menemukan bahwa belanja modal tidak

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda. Berdasarkan uraian mengenai belanja modal, maka hipotesis yang diajukan penulis yaitu :

**H3 : Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. (Semakin efisien)**

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Dengan menggunakan sumber data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Data sekunder merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung melainkan melalui perantara. Sumber data lainnya di peroleh dengan mengkaji dan memahami buku, jurnal penelitian dan skripsi terdahulu yang bahasannya berkaitan dengan penelitian.

#### B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *probability sampling* dimana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Ada beberapa metode dalam teknik *probability sampling* dan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *multistage sampling*. *Multistage sampling* merupakan proses pengambilan sampel dengan menggunakan dua tahap. Tahap pertama yaitu *cluster sampling*, populasi dibagi kedalam kelompok kewilayahan untuk dipilih perwakilan dari setiap kelompok wilayah/*cluster*. Dalam penelitian ini yang dimaksud kedalam kelompok wilayah/*cluster* yaitu perprovinsi.

Tahap kedua yaitu *simple random sampling*. Masing-masing *cluster* di ambil 5 sampel kabupaten/kota ( $5 \times 33 = 165$  sampel) secara acak.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Dimana data tersebut merupakan data arsip dan buku-buku yang berhubungan dengan sektor publik, dana perimbangan, belanja daerah, dan kinerja keuangan daerah.

### **D. Definisi dan Operasionalisasi Variabel**

Definisi dan operasionalisasi variabel merupakan sarana untuk menjelaskan informasi yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Berikut ini merupakan definisi dan oprasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian antara lain :

#### **1. Variabel Independen**

Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif. Jika terdapat variabel bebas, variabel terikat juga hadir dengan setiap unit kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat (Sekaran & Bougie, 2017). Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Dana Perimbangan, Belanja Operasi, dan Belanja Modal.

##### **a.) Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan merupakan pendanaan pemerintah daerah yang bersumber dari Pendapatan yang di transfer oleh Pemerintah Pusat

yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan ditujukan sebagai kesetaraan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rumus yang dipakai untuk mengukur Dana Perimbangan dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Ln}(\text{Dana Perimbangan})$$

#### **b.) Belanja Operasi**

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi yaitu komponen belanja daerah yang manfaatnya habis dalam satu periode anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang (Suhaedi, 2019). Pada umumnya proporsi belanja operasi lebih mendominasi total belanja daerah yaitu sekitar 60-90 persen (Suhaedi, 2019). Dimana pemerintah daerah yang memiliki tingkat pendapatan tinggi cenderung mempunyai porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang mempunyai tingkat pendapatan rendah. Untuk menganalisis belanja operasi biasanya digunakan rasio belanja operasi terhadap total belanja seperti berikut ini (Sartika, 2019) :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

### c.) Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah dengan tujuan untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sesuai BAS, belanja dikategorikan ke dalam belanja modal apabila pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas, pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah, serta perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual (Apriana & Suryanto, 2010). Pemerintah daerah yang memiliki tingkat pendapatan rendah akan memiliki proporsi belanja modal yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah dengan pendapatan rendah akan lebih giat melakukan belanja modal sebagai investasi jangka panjang. Dalam menganalisis belanja modal, dapat digunakan rasio belanja modal seperti berikut ini (Sartika, 2019) :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

## 2. Variabel Dependen

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang menjadi perhatian untuk peneliti. Dengan tujuan memahami dan mendeskripsikan variabel terikat atau menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya (Sekaran & Bougie, 2017). Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Efisiensi dapat digunakan untuk menilai apakah otoritas publik mengelola sumber daya yang tersedia dengan benar untuk menyediakan layanan dan fasilitas publik dengan sebaik mungkin (Narbón-perpiñá *et al.*, 2020). Efisiensi merupakan konsep yang berkaitan dengan produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan (Indayani *et al.*, 2018). Suatu kegiatan dikatakan telah dilaksanakan secara efisien apabila pelaksanaan pekerjaan telah mencapai keluaran dengan biaya (masukan) yang paling rendah atau dengan biaya yang seminim mungkin diperoleh hasil yang diinginkan (Gamayuni, 2019). Dalam mengukur efisiensi kinerja keuangan pemerintah dapat menggunakan rumus yang diperoleh dari penelitian (Kusuma & Handayani, 2017) :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

## E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi dalam menentukan hipotesis yang dibuat diterima atau ditolak. Persamaan model regresi linier berganda yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

### Keterangan :

Y = Efisiensi Kinerja Keuangan

a = Harga Konstan

$b_1$  = Koefisien Regresi Variabel  $X_1$

$b_2$  = Koefisien Regresi Variabel  $X_2$

$b_3$  = Koefisien Regresi Variabel  $X_3$

$X_1$  = Dana Perimbangan

$X_2$  = Belanja Operasi

$X_3$  = Belanja Modal

$\varepsilon$  = Standar error

Data yang digunakan dalam penelitian ini di uji menggunakan alat uji sebagai berikut :

### 1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan pengujian yang dilakukan berdasarkan sampel. Dimana uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Penjelasan

tersebut dideskripsikan berdasarkan analisis data. Dalam penelitian ini, hasil dari uji statistik deskriptif akan memberikan informasi mengenai nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata serta standar deviasi dari masing-masing variabel dalam penelitian.

## **2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan sebagai alat pendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan mengenai asumsi klasik berdasarkan persamaan regresi linier berganda yang digunakan. Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa uji diantaranya :

### **a.) Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan sebagai penguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Menurut (Priyastama, 2017) model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki nilai residual terdistribusi secara normal.

### **b.) Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas merupakan uji yang digunakan untuk menemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen pada model regresi. Uji multikolonieritas juga digunakan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut (Sujarweni & Utami Retnani, 2019) jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10, maka tidak terjadi multikolinieritas. Menurut (Priyastama, 2017) model regresi yang baik seharusnya

tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati).

#### **c.) Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi merupakan uji dimana terdapat korelasi antara residual pada periode  $t$  dengan residual pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Uji autokorelasi dapat di deteksi dengan menggunakan nilai Durbin Watson. Jika nilai Durbin Watson di antara  $-2$  sampai  $2$  maka tidak terjadi autokorelasi (Sujarweni & Utami Retnani, 2019). Menurut (Priyastama, 2017) model regresi yang baik adalah yang tidak memiliki autokorelasi.

#### **d.) Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas merupakan uji dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Menurut (Priyastama, 2017) model regresi yang baik adalah tak terjadi heteroskedastisitas.

### **3. Uji Statistik F**

Uji F digunakan untuk menghitung seberapa besar variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan derajat kebebasan pembilang menggunakan  $K-1$  atau jumlah variabel dikurangi 1 (Setiawan, 2015). Penentu Hipotesis diterima atau di tolak adalah sebagai berikut :

- a.) Jika koefisien F hitung signifikan pada taraf lebih besar dari 5% maka  $H_0$  diterima.

b.) Jika koefisien F hitung signifikan pada taraf lebih kecil atau sama dengan 5% maka  $H_0$  ditolak.

#### **4. Uji Statistik t**

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah model persamaan regresi telah signifikan untuk digunakan mengukur pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan perbandingan antara t hitung dengan t tabel pada tingkat kepercayaan 95%. Apabila probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 165 menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi kinerja keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2019 yaitu sebesar 94,44%. Selain itu dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa :

1. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Belanja operasi tidak berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **B. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sehingga untuk penelitian-penelitian selanjutnya perlu memperbaiki dan mengembangkannya kembali. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain :

1. Sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan 165 kabupaten/kota di Indonesia yang di pilih secara acak. Serta hanya menggunakan data LKPD untuk periode satu tahun.

2. Penelitian ini hanya menggunakan sebagian komponen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu dana perimbangan, belanja operasi dan belanja modal.

### **C. Saran**

Ada beberapa saran yang diberikan peneliti kepada peneliti selanjutnya yaitu :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data LKPD untuk beberapa tahun sehingga hasil yang di peroleh dapat menjelaskan keefisiensian kinerja keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel sehingga dapat menjelaskan dan memperkuat efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F. (2019). *Penganggaran Di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris*. UB Press.
- Aminah, I. N., Afiah, N. N., & Pratama, A. (2019). Pengaruh Size, Wealth, Intergovernmental Revenue Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 147.
- Andirfa, M., Basri, H., Com, M., Shabri, M., Majid, A., & Ec, M. (2016). *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh*. 30–38.
- Andrean, A., & Sari, V. F. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Dan Budget Ratcheting Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 1984–2000.
- Apriana, D., & Suryanto, R. (2010). Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Journal Accounting and Investment*, 11(1), 68–79.
- Armaja, Ibrahim, R., dan A. (2015). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168–181.
- Astiti, D. N. Y., & Mimba, N. P. H. (2016). Pengaruh Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3), 1924–1950.
- Chen, Z., Lv, B., & Liu, Y. (2019). Financial development and the composition of government expenditure : Theory and cross-country evidence. *International Review of Economics and Finance*, 64(September), 600–611.
- Dalimunthe, & Patrisia. (2019). *The Effect of Financial Characteristics, Misstatement and Audit Quality toward the Financial Performance in West Sumatera*. 64(2015), 646–650.
- Delewa, P. O. (2016). *Central Government Patronage, Donor Aid, and Budget Performance in Local Government : Testing A Mediation Effect*.
- Ferreira, N., & Marques, R. C. (2014). Revisiting the determinants of local government performance. *Omega*, 44, 91–103.
- Gamayuni, R. R. (2019). the Initial Implementation of Accrual Based Accounting,

the Effect on Performance and Financial Reporting Quality At Local Governments in Indonesia. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(1), 13.

Halim, Abdul dan Kusufi, M. S. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Salemba Empat.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.

Honga, A., & Ilat, V. (2014). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 278–288.

Indayani, F., Lindrianasari, & Gamayuni, R. R. (2018). The effect of village characteristics toward village finance efficiency in Lampung, indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 7(4), 93–99.

Jannah, M. (2019). The Effect of Government Size, Intergovernmental Revenue, Regional Expenditur and Capital Expenditure to the Financial Performance of Regional Government Period 2013-2017). *Prosiding 2d Business and Economic Conference in Utilizing of Modern Technology*.

Kusuma, A. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(1), 404–420.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Keempat). UPP STIM YKPN.

Maydiyanti, S., Putri, A. M., & Anriva, D. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 69–78.

Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1), 57–66.

Narbón-perpiñá, I., Arribas, I., Balaguer-coll, M. T., & Tortosa-ausina, E. (2020). Explaining local governments ' cost e ffi ciency: Controllable and uncontrollable factors. *Cities*, 100(February), 102665.

Nordiawan, Deddi dan Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Salemba Empat.

Otsuka, A., Goto, M., & Sueyoshi, T. (2014). Cost-efficiency of Japanese local governments: Effects of decentralization and regional integration. *Regional*

*Studies, Regional Science, 1(1), 207–220.*

Priyastama, R. (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS. Start Up.*

Risyad, M., Ethika, & N, N. (2018). *Pengaruh Belanja Rutin, Belanja Modal, Leverage dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.*

Saputri, S. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *E- Jurnal EP Unud, 1999(23), 452–459.*

Sari, I., Agusti, R., & Rofika, R. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 3(1), 679–692.*

Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Tangible Journal, 5(1), 43–57.*

Sekaran & Bougie. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis.* Salemba Empat.

Setiawan, B. (2015). Teknik Hitung Manual Analisis Regresi Linear Berganda Dua Variabel Bebas. *Teknik Praktis Analisis Data Penelitian Sosial Dan Bisnis Dengan SPSS, 0–9.*

Sinambela, & Pohan. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis, 53(9), 1689–1699.*

Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Ayu Sofiati, N. (2017a). *Keuangan di Era Otonomi Daerah (satu).* Cv. Andi Offset.

Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Ayu Sofiati, N. (2017b). *Keuangan Di Era Otonomi Daerah.* Cv. Andi Offset.

Suhaedi, W. (2019). *Analisis belanja daerah.* 63–78.

Sujarweni, V. W., & Utami Retnani, L. (2019). *Pintar Mengolah Data Statistik Untuk Segala Keperluan Secara Otodidak (Pertama).*

Sukma, A. N. P. G., & Panji, I. B. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2015). *E-Jurnal Manajemen Unud, 7(2), 1080–1110.*

Thalib, F., & Ekaningias, D. (2019). The effect of original LG revenue, balancing fund, and capital expenditure on LG financial performance in regencies in East Java Province. *The Indonesian Accounting Review, 9(1), 39.*

- The Ministry of Finance of The Republic of Indonesia. (2017). *Summary of the Local Government Budgets*. 20.
- Wahyuni, E., & Ardini, L. (2018). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *E-ISSN : 2460-0585*, 7.
- www.kemenkeu.go.id. (n.d.). *Ini “Catatan” Menkeu Terhadap Pengelolaan APBD yang Kurang Optimal*.
- Yasin, M., Riyadi, S., & Ingga, I. (2017). Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(September).
- Yuliansyah, R., Susanti, E. I., & Yanti, A. (2020). *The Effect of Regional Original Revenue, Balance Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of District Governments in West Java Province in 2013–2017*. 127(Aicar 2019), 152–156.
- Yunita, P. V., & Rasmini, N. K. (2018). *Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh PAD , Dana Perimbangan , dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Indonesia Email : venny.ynt@gmail.com Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Indonesia*. 1049–1065.
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan (JRAK)*, 7(1), 11–21.